

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perkembangan Pendidikan Islam yang tidak lagi hanya berarti pengajaran agama saja akan tetapi mencakup arti pendidikan pada semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam,¹ di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa reformasi dewasa ini. Bahkan secara kronologis perkembangan pendidikan di Indonesia mencakup : pendidikan zaman kerajaan Hindu dan Budha, pendidikan zaman kerajaan/kesulthanan Islam, pendidikan zaman VOC dan kolonial Belanda, pendidikan zaman pendudukan Jepang, dan pendidikan zaman setelah kemerdekaan.² Berbagai kebijakan pendidikan yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia tersebut memiliki dasar filosofis dan tujuan yang berbeda-beda, baik pada zaman kolonial Belanda dan zaman pendudukan Jepang maupun pada zaman sesudah kemerdekaan.

Dalam Perang Pasifik (Perang Dunia ke II), Jepang memenangkan peperangan pada 1942, berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika Kolonial Belanda menyerah tanpa

¹Samsul Nizar, *Sejarah Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT. Ciputat Press Group, 2005), h. 172.

²Mestoko Sumarsono, *Indonesia dan Hubungan antar Bangsa*, (Jakarta, Sinar Harapan, 1985), h. 3.

syarat kepada sekutu.³ Penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai konsep Kemakmuran Bersama Asia Raya (*Hokko I chi-u*) dengan semboyan "Asia untuk Asia."⁴ Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya pada tahun 1940. Jepang akan menjadi pusat lingkungan pengaruh atas delapan daerah yakni: Manchuria, Daratan Cina, kepulauan Muangtai, Malaysia, Indonesia, dan Asia Rusia.⁵ hal ini menjadi harapan Jepang untuk menguasai Asia Timur dengan berbagai propaganda dan menggambarkan berbagai pengalaman mereka dalam perang dunia II melawan sekutu, salah satu Negara di Asia timur.

Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesiapun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan pasifik. Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942.⁶ Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan

³Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), h. 85. Rohidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2004), h. 17.

⁴Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2001), h. 267.

⁵Suwendi, *op. cit.*, h. 87.

⁶Rohidin Wahab, *op. cit.*, h. 18.

berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda dan khusus pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan mencakup :

1. Mengubah Kantor *Voor Islamistische Zaken* pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari,
2. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin,
3. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta,
4. Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan, dan
5. Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU.⁷

Terlepas dari tujuan awalnya guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, ulama dan pemimpin nasionalis, walaupun kemudian menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang kemudian menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator Jepang)

⁷Redja Mudaryanto, *op. cit.*, h. 268.

untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Penjajah Jepang telah memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren, Madrasah, Surau, dan semacamnya mempunyai andil besar terhadap proses kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajah.⁸ Lembaga-lembaga tersebut menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap penjajah. Lembaga pendidikan Pesantren yang dikenal sebagai lembaga mandiri yang berbasiskan masyarakat bawah tak luput dari pengawasan pemerintah Kolonial. Pada masa Belanda lembaga ini disebut dengan nama *Priesteren* dan pada masa Jepang disebut *Kokumin Gakko*. Kolonial Belanda melalui tekanan dan pembatasan yang sangat ketat dan kolonial Jepang dengan pengendalian. Hal ini dilakukan sebab lembaga-lembaga pendidikan Islam dicurigai sebagai kantong-kantong perlawanan dan pemberontakan terhadap penjajah. Oleh karena itu upaya mendiskreditkan dan

⁸Pesantren, Madrasah dan Surau merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia. Akar-akar historis keberadaan pesantren di Indonesia dapat di lacak jauh ke belakang, yaitu pada masa-masa awal datangnya Islam di bumi Nusantara ini dan tidak diragukan lagi pesantren intens terlibat dalam proses Islamisasi tersebut. Sementara proses Islamisasi itu, pesantren dengan canggihnya telah melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam prespektif historis, lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Menurut M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping sebagai sebuah lembaga pendidikan. Lihat Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta, Erlangga, 2009), h. 17. M. Dawam Raharjo, "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah*, (Jakarta, P3M, 1985), h. 7.

diskriminatif terhadap lembaga-lembaga tersebut dilakukan melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan. Akibat kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut maka para pelopor pendidikan Islam pada saat itu setidaknya mempunyai dua sikap yaitu *passive defensive* dan *active progressive*, sebagaimana ditulis oleh Imam Machalli sebagai berikut :

Sikap *active-progressive* memandang bahwa tekanan, pengawasan dan pembatasan terhadap lembaga pendidikan Islam merupakan kebijakan diskriminatif kolonial. Oleh karena itu, usaha yang harus dilakukan umat Islam untuk “menyelamatkan” pendidikan Islam adalah berupaya mencapai kesetaraan dan kesejajaran dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, baik dalam segi kelembagaan maupun kurikulumnya. Bagi para penggerak sikap ini berpandangan bahwa ketergantungan pada tekanan penjajah justru akan semakin melemahkan posisi umat Islam sendiri. Sebaliknya, membiarkan sikap *defensive* terus-menerus akan semakin memberi ruang lebar bagi gerakan pendidikan kolonial. Oleh karena itu diperlukan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala kolonial, akan tetapi tidak tercerabut dari akar keagamaannya. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh dan berkembangnya sekolah Islam atau madrasah di berbagai wilayah, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Sementara sikap *passive-defensive* nampak pada usaha lembaga-lembaga pendidikan Islam menghindari dari pengaruh politik kolonial terhadap system pendidikan Islam yang dipraktikkannya. Hal ini dapat dilihat di lembaga pendidikan pesantren. Pesantren pada saat itu sepenuhnya menjaga jarak dengan pemerintah kolonial, baik secara lokasi maupun orientasi pendidikannya. Lokasi pesantren pada umumnya terletak di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan dan desa terpencil, sedangkan pendidikan pesantren lebih berorientasi pada pembinaan mental-keagamaan. Posisi pesantren dalam hal ini menjadi benteng pertahanan ummat atas penetrasi penjajah dalam bidang pendidikan. Sikap dan pilihan pesantren menjadi lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh pemerintah kolonial memang terwujud meski harus dibayar dengan resiko terasing dari perkembangan masyarakat modern, dan hal tersebut masih tersisa sampai sekarang.⁹ pendidikan Islam yang ingin bertahan untuk menjalani

kurikulum pendidikan yang diinginkan oleh lembaga tersebut harus bisamenyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Kalau tidak mau mengikuti aturan yang ada terpaksa harus mengambil resiko untuk menjauh dari perkotaan.

Tekanan dan kebijakan diskriminatif kolonial terus berjalan, namun demikian di bawah tekanan dan kebijakan tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam justru mampu menghasilkan tokoh-tokoh tangguh yang menjadi *pioneer* dan penggerak melawan penjajah menuju Indonesia merdeka. Pergantian era kekuasaan sangat mempengaruhi model dan kebijakan pendidikan yang dihasilkan. Pendidikan memang tidak bisa terlepas dari situasi politik sebuah bangsa. Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan pendidikan sebagai sarana memperoleh tenaga kerja di bidang administrasi tingkat rendahan. Pendidikan tingkat lanjut hanya diprioritaskan pada kalangan bangsawan semata.

Pada masa Jepang, pendidikan tak lepas dari propaganda Jepang yang disisipkan pada materi pelajaran dari tingkat SD sampai dengan SLTA. Akibatnya, semua rakyat mengakui kehebatan dan superioritas Jepang sebagai bangsa maju di kawasan Asia Pasifik. Mereka melaksanakan apa yang diharapkan Jepang yaitu sebagai serdadu yang siap maju di medan perang seperti: Romusha, Heiho, dan Peta. Sebaliknya, pada masa Indonesia merdeka pendidikan diarahkan sebagai medium pembangkit rasa nasionalisme. Karena keadaan tertentu, periode ini tidak banyak pengembangan pendidikan yang bisa

⁹Imam Machalli, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa Ke Masa ; Dari Kebijakan Diskriminatif Menuju Kebijakan Berkeadilan*, dalam <http://www.imammachali.com/berita-138- html>, diakses Sabtu, 12 Januari 2013.

diharapkan. Secara kualitas, pendidikan tetap terjaga mutunya hanya pendirian bangunan sekolah tidak banyak artinya.

Pada masa Orde Baru, perubahan kurikulum senantiasa silih berganti. Perubahan dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi kepentingan global yang berubah. Hal ini pun masih dilanjutkan dengan pergantian kurikulum pada era reformasi. Kurikulum 2006 merupakan alternatif terakhir dari bangunan kurikulum dalam sejarah Indonesia. Artinya, pemerintah tetap belajar dari pengalaman. Lintasan pendidikan yang berusia cukup tua pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang penuh nuansa keberpihakan pada esensi pendidikan itu sendiri.

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul : *Kebijakan Sistem Pendidikan Islam di Era Penjajahan Belanda dan Jepang (Studi Komperatif)*. Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan kajian yang sangat menarik.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya di Indonesia dan penjajah Jepang tentang pendidikan Islam dalam perkembangan sistem pendidikan Islam pasca kemerdekaan ?

- b. Apakah kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya di Indonesia dan penjajah Jepang tentang pendidikan Islam dalam perkembangan sistem pendidikan Islam pasca kemerdekaan tersebut sejalan dengan konsep pendidikan Islam?
- c. Apa saja bentuk-bentuk kebijakan kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya di Indonesia dan penjajah Jepang tentang pendidikan Islam dalam perkembangan sistem pendidikan Islam pasca kemerdekaan ?
- d. Bagaimana kontribusi kebijakan kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya di Indonesia dan penjajah Jepang tentang pendidikan Islam dalam perkembangan sistem pendidikan Islam pasca kemerdekaan ?
- e. Bagaimana konsistensi pelaksanaan kebijakan kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya dan penjajah Jepang tentang pendidikan Islam di Indonesia?
- f. Apa saja ruang lingkup kebijakan kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya dan penjajah Jepang tentang pendidikan Islam di Indonesia ?
- g. Bagaimana pengaruh kebijakan kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya dan penjajah Jepang tentang pendidikan Islam di Indonesia terhadap perkembangan Pendidikan Islam pasca kemerdekaan ?

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada kebijakan sistem pendidikan Islam di akhir era penjajahan Belanda dan Jepang serta pengaruhnya

terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia di awal kemerdekaan.

3. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- a. Apa saja bentuk kebijakan penjajah Belanda di akhir masa penjajahannya dan Jepang tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia?
- b. Bagaimana sistem pendidikan Islam di Indonesia di era terakhir masa penjajahan Belanda dan penjajah Jepang ?
- c. Bagaimana pengaruh kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya dan penjajah Jepang tentang sistem pendidikan Islam terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia di awal kemerdekaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk kebijakan penjajah Belanda di akhir masa penjajahannya dan Jepang tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia,
2. Untuk mengetahui sistem pendidikan Islam di Indonesia di era terakhir masa penjajahan Belanda dan penjajah Jepang,
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan Belanda di akhir masa penjajahannya dan penjajah Jepang tentang sistem pendidikan Islam terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia di awal kemerdekaan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Islam,
2. Merupakan rujukan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan pendidikan Islam, sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah pernah ada.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.